



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bahwa penciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi maka perlu disusun keseragaman pola klasifikasi arsip;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Pengelolaan Arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
10. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

11. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati bertujuan terwujudnya sistem pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.

## BAB III KLASIFIKASI ARSIP

### Pasal 3

Klasifikasi arsip dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang bersifat substantif dan fasilitatif.

### Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan kode angka (*numeric*) dalam bentuk berjenjang.
- (2) Kode angka (*numeric*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola klasifikasi dengan menggunakan tiga angka dasar yang disusun berdasarkan fungsi dan tugas pencipta arsip yang meliputi:
  - a. 000 - umum
  - b. 100 - pemerintahan
  - c. 200 - politik
  - d. 300 - keamanan dan ketertiban
  - e. 400 - kesejahteraan
  - f. 500 - perekonomian
  - g. 600 - pekerjaan umum dan ketenagakerjaan
  - h. 700 - pengawasan
  - i. 800 - kepegawaian
  - j. 900 - keuangan
- (3) Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjabaran skema klasifikasi yang terinci secara desimal yang mewakili pokok masalah (*primer*), sub masalah (*sekunder*), dan sub-sub masalah (*tertier*).

Pasal 5

- (1) Bersifat substantif dan fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pola klasifikasi yang mencerminkan penjabaran dari fungsi dan tugas pencipta arsip.
- (2) Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok kode klasifikasi 100 sampai dengan 600.
- (3) Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok kode klasifikasi 000, 700, 800, dan 900.

Pasal 6

Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Pebruari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 96

**PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI**

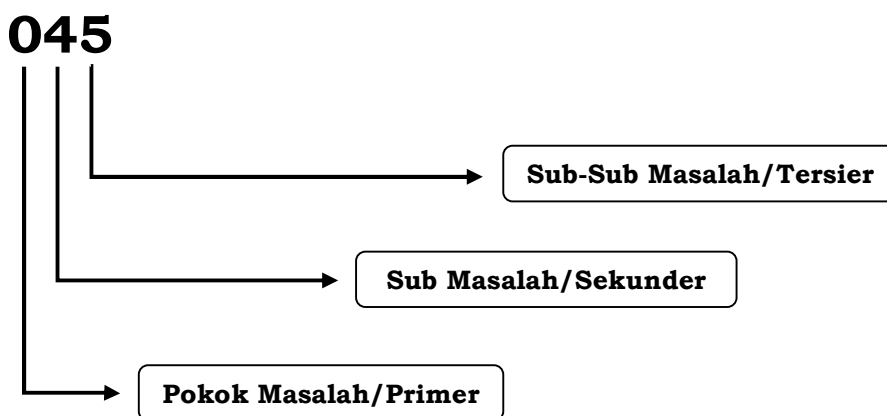
**A. SKEMA KLASIFIKASI ARSIP**

Klasifikasi arsip menggunakan kode angka (*numeric*) dengan menggunakan tiga angka dasar yang disusun berdasarkan fungsi dan tugas pencipta arsip, yang meliputi:

- 000 : UMUM
- 100 : PEMERINTAHAN
- 200 : POLITIK
- 300 : KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- 400 : KESEJAHTERAAN
- 500 : PEREKONOMIAN
- 600 : PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
- 700 : PENGAWASAN
- 800 : KEPEGAWAIAN
- 900 : KEUANGAN

Kode klasifikasi diatur secara berjenjang dengan skema klasifikasi yang terinci secara desimal yang mewakili Pokok Masalah (*primer*), Sub Masalah (*sekunder*), dan Sub-sub masalah (*tersier*).

Adapun sistematika penulisan jenjang klasifikasi dalam pengelolaan arsip dinamis, sebagai berikut:



**B. KODE KLASIFIKASI**

**000 UMUM**

- 001 Lambang
  - .1 Garuda
  - .2 Bendera Kebangsaan
  - .3 Lagu Kebangsaan
  - .4 Daerah
    - .31 Provinsi
    - .32 Kabupaten/ Kota
  
- 002 Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1
  - .1 Bintang
  - .2 Satyalencana
  - .3 Samkarya Nugraha
  - .4 Monumen
  - .5 Penghargaan Secara Adat
  - .6 Penghargaan lainnya
  
- 003 Hari Raya/Besar
  - .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
  - .2 Hari Raya Keagamaan
  - .3 Hari Ulang Tahun
  - .4 Hari-hari Besar Internasional
  
- 004 Ucapan
  - .1 Ucapan Terima Kasih
  - .2 Ucapan Selamat
  - .3 Ucapan Belasungkawa
  - .4 Ucapan Lainnya
  
- 005 Undangan
  
- 006 Tanda Jabatan
  - .1 Pamong Praja
  - .2 Tanda Pengenal
  - .3 Pejabat lainnya
  
- 007 -
  
- 008 -
  
- 009 -
  
- 010 URUSAN DALAM**
  
- 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong /Kantor Dinas

- 012 Rumah Dinas
  - .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
  - .2 Perabot Rumah Dinas
  - .3 Rumah Dinas Golongan 1
  - .4 Rumah Dinas Golongan 2
  - .5 Rumah Dinas Golongan 3
  - .6 Rumah/Bangunan Lainnya
  - .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Mess/Guest House
- 014 Rumah Susun/Apartemen
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 Telepon/Faximile/Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
  - .1 Upacara Bendera
  - .2 Tata Tempat
  - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
  - .3 Audiensi / Menghadap Pimpinan
  - .4 Alamat-Alamat Kantor Pejabat
  - .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
- 020 PERALATAN**
  - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris
- 029 -
- 030 KEKAYAAN DAERAH**
  - 031 Sumber Daya Alam



032 Asset Daerah

033 -

034 -

035 -

036 -

037 -

038 -

039 -

**040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI**

041 Perpustakaan

- .1 Umum
- .2 Khusus
- .3 Perguruan Tinggi
- .4 Sekolah
- .5 Keliling

042 Dokumentasi

043 -

044 -

045 Kearsipan

- .1 Pola Klasifikasi
- .2 Penataan Berkas
- .3 Penyusutan Arsip
- .31 Jadwal Retensi Arsip
- .32 Pemindahan Arsip
- .33 Penilaian Arsip
- .34 Pemusnahan Arsip
- .35 Penyerahan Arsip
- .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
- .37 Daftar Pencarian Arsip
- .4 Pembinaan Kearsipan
- .41 Bimbingan Teknis
- .5 Pemeliharaan /Perawatan Arsip
- .6 Pengawetan/Fumigasi

046 Sandi

047 Website

048 Pengelolaan Data

049 Jaringan Komunikasi Data

**050 PERENCANAAN**

- .1 Repelita/8 Sukses
  - .11 Pelita Daerah
  - .12 Bantuan Pembangunan Daerah
  - .13 Bappeda
- 051 Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini :  
Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan,  
Tambahkan Perincian 100 Pada 051  
Contoh: Proyek Kepenjaraan : 051.86
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan Dan Ketertiban Tambahkan Perincian 300 Pada 053  
Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan Peincian 400 pada 054  
Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671
- 055 Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 500 Pada 055  
Contoh: Proyek Pasar 055.112
- 056 Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada 056  
Contoh: Proyek Jembatan 056.3
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN**
- .1 Program Kerja
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)  
.1 Susunan dan Tata Kerja  
.2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem
- 066 Stempel Dinas
- 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis
- 068 Komputerisasi / Siskomdagri
- 069 Standar Pelayanan Minimal

**070 PENELITIAN**

- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
- 075 Kementerian Lainnya
- 076 Non Kementerian
- 077 Provinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan /Desa

**080 KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR**

- 081 Gubernur
- 082 Bupati / Walikota
- 083 Komponen, Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional Di Dalam Negeri
- 086 Internasional Di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -

**090 PERJALANAN DINAS**

- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri Ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1)
- 094 Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing Ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri Ke Luar Negeri

- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN**
- 101 Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar negeri
- 102 GDN
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109 -
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT**
- 111 Presiden  
Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan
  - .1 Pertanggung jawaban presiden kpd MPR
  - .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 112 Wakil Presiden  
Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan
  - .1 Pertanggung jawaban wakil presiden kepada MPR
  - .2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 113 Susunan Kabinet
  - .1 Reshuffle
  - .2 Penunjukan Menteri *ad interim*
  - .3 Sidang Kabinet
- 114 Kementerian Dalam Negeri
  - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan
- 115 Kementerian lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Kementerian
- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama Antar Kementerian

**120 PEMERINTAH PROVINSI**

- .04 Laporan daerah
- .042 Monografi tambahkan kode wilayah
  - .1 Koordinasi
  - .2 Instansi Tingkat Provinsi
  - .21 Dinas Otonomi
  - .22 Instansi Vertikal
  - .23 Kerjasama antar Provinsi/Daerah
  
- 121 Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya
  
- 122 Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
  
- 123 Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
  
- 124 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
  - .1 Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, dan sebagainya
  - .2 Pemekaran Wilayah
  - .3 Forum Koordinasi lainnya
  
- 125 Pembentukan Pemekaran Wilayah
  - .1 Pembinaan/Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.
  - .2 Pembentukan Wilayah
  - .3 Pemindahan Ibukota
  - .4 Perubahan batas Wilayah
  - .5 Pemekaran Wilayah
  
- 126 Pembagian Wilayah
  
- 127 Penyerahan Urusan
  
- 128 Swaparaja/Penataan Wilayah/Daerah
  
- 129 -

**130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

- 131 Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb
  - .1 Sambutan / Pengarahan / Amanat
  
- 132 Wakil Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,

- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
  - .1 Muspida
  - .2 Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional)
  - .3 Forum Koordinasi Lainnya
  - .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
- 135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
  - .1 Pemindahan Ibukota
  - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
  - .3 Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota
  - .4 Perubahan Batas Wilayah
  - .5 Pemekaran Wilayah
  - .6 Permasalahan Batas Wilayah
  - .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota
  - .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah, Jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
  - .1 Sambutan / Pengarahan / Amanat
  - .2 Pembentukan Kecamatan
  - .3 Pemekaran Kecamatan
  - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
  - .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kecamatan
  - .6 -
  - .7 -
- 139 -
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN**
- 141 Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
  - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
  - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
  - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
  - .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
  - .5 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan

- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa  
Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan Perinciannya
- 148 Perangkat Kelurahan
  - .1 Kepala Kelurahan
  - .2 Sekretaris Kelurahan
  - .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
  - .1 Rukun Tetangga
  - .2 Rukun Warga
  - .3 Rukun Kampung
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD**
- 151 Keanggotaan MPR
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pemberhentian
  - .3 Recall
  - .4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan
- 156 Persidangan Sidang Pleno Dengar Pendapat/Rapat Komisi Reses
- 157 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak
- 160 DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH**
- 161 Keanggotaan
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan
  - .3 Pemberhentian
  - .4 Recall
  - .5 Meninggal
  - .6 Pelanggaran
- 162 Persidangan
  - .1 Reses
- 163 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan

- 164 Hak
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi
- 166 -
- 167 -
- 168 -
- 169 -
- 170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH**
- 171 Keanggotaan
  - .1 Pencalonan
  - .2 Pengangkatan
  - .3 Pemberhentian
  - .4 Recall
  - .5 Pelanggaran
- 172 Persidangan
- 173 Kesejahteraan
  - .1 Keuangan
  - .2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -
- 180 HUKUM**
  - .1 Kontitusi
    - .11 Dasar Hukum
    - .12 Undang-Undang Dasar
  - .2 GBHN
  - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
- 181 Perdata
  - .1 Tanah
  - .2 Rumah
  - .3 Utang/Piutang
    - .31 Gadai
    - .32 Hipotik
  - .4 Notariat



- 182 Pidana
  - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan
  - Peradilan Agama Islam 451.6
  - Peradilan Perkara Tanah 593.71
    - .1 Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
  - .1 Visa
  - .2 Pasport
  - .3 Exit
  - .4 Reentry
  - .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
- 186 Kependidikan
- 187 Kejaksaan
- 188 Peraturan Perundang-Undangan
  - .1 TAP MPR
  - .2 Undang-Undang Dasar
  - .3 Peraturan
    - .31 Peraturan Pemerintah
    - .32 Peraturan Menteri
    - .33 Peraturan Lembaga Non Departemen
    - .34 Peraturan Daerah
      - .341 Peraturan Provinsi
      - .342 Peraturan Kabupaten/Kota
  - .4 Keputusan
    - .41 Presiden
    - .42 Menteri
    - .43 Lembaga Non Departemen
    - .44 Gubernur
    - .45 Bupati/Walikota
  - .5 Instruksi
    - .51 Presiden
    - .52 Menteri
    - .53 Lembaga Non Departemen
    - .54 Gubernur
    - .55 Bupati/Walikota
- 189 Hukum Adat
  - .1 Tokoh Adat/Masyarakat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI**
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama Dengan Negara Asing
  - .1 Asean

- .2 Bantuan Luar Negeri/Hibah
- 194 Perwakilan RI Di Luar Negeri/Hibah
- 195 PBB
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
- 198 -
- 199 -
- 200 POLITIK**
- 201 Kebijakan umum
- 202 Orde baru
- 203 Reformasi
- 204 -
- 205 -
- 206 -
- 207 -
- 208 -
- 209 -
- 210 KEPARTAIAN**
- 211 Lambang partai
- 212 Kartu tanda anggota
- 213 Bantuan keuangan parpol
- 214 -
- 215 -
- 216 -
- 217 -
- 218 -
- 219 -

**220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

- 221 Berdasarkan perjuangan
  - .1 Perintis kemerdekaan
  - .2 Angkatan 45
  - .3 Veteran
- 222 Berdasarkan Kekaryaan
  - .1 PEPABRI
  - .2 Wredatama
- 223 Berdasarkan kerohanian
- 224 Lembaga adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 -
- 227 -
- 228 -
- 229 -

**230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL**

- 231 Ikatan Dokter Indonesia
- 232 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 233 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
- 239 Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya

**240 ORGANISASI PEMUDA**

- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor

245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia

246 Gerakan Pemuda Marhaenis

247 -

248 -

249 -

**250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN**

251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia

252 Organisasi Buruh Internasional

253 Himpunan Kerukunan Tani

254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia

255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia

256 -

257 -

258 -

259 -

**260 ORGANISASI WANITA**

261 Dharma Wanita

262 Persatuan Wanita Indonesia

263 Pemberdayaan Perempuan (wanita)

264 Kongres Wanita

265 -

266 -

267 -

268 -

269 -

**270 PEMILIHAN UMUM**

271 Pencalonan

272 Nomor Urut Partai/Tanda Gambar

- 273 Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih/Daftar Pemilih
- 276 Sarana
  - .1 TPS
  - .2 Kendaraan
  - .3 Surat Suara
  - .4 Kotak Suara
  - .5 Dana
- 277 Pemungutan Suara / Perhitungan Suara
- 278 Penetapan Hasil Pemilu
- 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
- 280 PENGUCAPAN SUMPAH JANJI MPR,DPR,DPD**
- 281 -
- 282 -
- 283 -
- 284 -
- 285 -
- 286 -
- 287 -
- 288 -
- 289 -
- 300 KEAMANAN / KETERTIBAN**
- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 -
- 304 -
- 305 -
- 306 -
- 307 -

308 -

309 -

**310 PERTAHANAN**

311 Darat

312 Laut

313 Udara

314 Perbatasan

315 -

316 -

317 -

318 -

319 -

**320 KEMILITERAN**

321 Latihan Militer

322 Wajib Militer

323 Operasi Militer

324 Kekaryaannya TNI Pejabat Sipil dari TNI  
.1 TMD

325 -

326 -

327 -

328 -

329 -

**330 KEAMANAN**

331 Kepolisian  
.1 Polisi Pamong Praja  
.2 Kamra  
.3 Kamling  
.4 Jaga Wana

332 Huru-Hara / Demonstrasi

- 333 Senjata Api Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-Surat Kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan / Larangan
- 339 Teroris

**340 PERTAHANAN SIPIL**

- 341 Perlindungan Sipil
- 342 -
- 343 -
- 344 -
- 345 -
- 346 -
- 347 -
- 348 -
- 349 -

**350 KEJAHATAN**

- 351 Makar / Pemberontak
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganiayaan, Pencurian
- 354 Subversi / Penyelundupan / Narkotika
- 355 Pemalsuan
- 356 Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan / KKN
- 357 Pemerksaan / Perbuatan Cabul
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan Lainnya

**360 BENCANA**

- 361 Gunung Berapi / Gempa
- 362 Banjir / Tanah Longsor
- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
  - .1 Pemadam Kebakaran
- 365 Kekeringan
- 366 Tsunami
- 367 -
- 368 -
- 369 -

**370 KECELAKAAN / SAR**

- 371 Darat
- 372 Udara
- 373 Laut
- 374 Sungai / Danau
- 375 -
- 376 -
- 377 -
- 378 -
- 379 -
- 380 -**
- 381 -
- 382 -
- 383 -
- 384 -
- 385 -
- 386 -



387 -

388 -

389 -

**390 -**

391 -

392 -

393 -

394 -

395 -

396 -

397 -

398 -

399 -

**400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**

401 Keluarga Miskin

402 PNPM Mandiri Pedesaan

403 -

404 -

405 -

406 -

407 -

408 -

409 -

**410 PEMBANGUNAN DESA**

411 Pembinaan Usaha Gotong Royong

.1 Swadaya Gotong Royong

.11 Penataan Gotong Royong

.12 Gotong Royong Dinamis

.13 Gotong Royong Statis

.14 Pungutan

- .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
  - .21 Pembinaan
  - .22 Klasifikasi
  - .23 Proyek
  - .24 Musyawarah
  - .3 Latihan Kerja Masyarakat
  - .31 Kader Masyarakat
  - .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  - .33 Pusat Latihan
  - .34 Kursus-Kursus
  - .35 Kurikulum / Syllabus
  - .36 Ketrampilan
  - .37 Pramuka
  - .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - .41 Program
  - .42 Pembinaan Organisasi
  - .43 Kegiatan
  - .5 Penyuluhan
  - .51 Publikasi
  - .52 Peragaan
  - .53 Sosio Drama
  - .54 Siaran Pedesaan
  - .55 Penyuluhan Lapangan
  - .6 Kelembagaan Desa
  - .61 Kelompok Tani
  - .62 Rukun Tani
  - .63 Subak
  - .64 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
- .1 Produksi Desa
  - .11 Pengolahan
  - .12 Pemasaran
  - .2 Keuangan Desa
  - .21 Perkreditan Desa
  - .22 Inventarisasi Data
  - .23 Perkembangan / Pelaksanaan
  - .24 Bantuan / Stimulans
  - .25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
  - .3 Koperasi Desa
  - .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
  - .32 Koperasi Usaha Desa
  - .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
  - .41 Jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
  - .42 Pengarahan
  - .43 Pusat
  - .44 Daerah
  - .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
  - .51 Pusat
  - .52 Daerah
  - .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
  - .61 Bantuan Langsung
  - .62 Bantuan Keserasian
  - .63 Bantuan Juara Lomba Desa

- 413 Prasarana Desa
  - .1 Prasarana Desa
  - .11 Pembinaan
  - .12 Bimbingan Teknis
  - .2 Pemukiman Kembali Penduduk
  - .21 Lokasi
  - .22 Diskusi
  - .23 Pelaksanaan
  - .3 Masyarakat Pradesa
  - .31 Pembinaan
  - .32 Penyuluhan
  - .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
  - .41 Rumah Sehat
  - .42 Proyek Perintis
  - .43 Pelaksanaan
  - .44 Pengembangan
  - .45 Perbaiki Kampung
  
- 414 Pengembangan Desa
  - .1 Tingkat Perkembangan Desa
  - .11 Jumlah Desa
  - .12 Pemekaran Desa
  - .13 Pembentukan Desa Baru
  - .14 Evaluasi
  - .15 Bagan
  - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
  - .21 Penyuluhan Program
  - .22 Lokasi UDKP
  - .23 Pelaksanaan
  - .24 Bimbingan/Pembinaan
  - .25 Evaluasi
  - .3 Tata Desa
  - .31 Inventarisasi
  - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
  - .33 Aplikasi Tata Desa
  - .34 Pemetaan
  - .35 Pedoman Pelaksanaan
  - .36 Evaluasi
  - .4 Perlombaan Desa
  - .41 Pedoman
  - .42 Penilaian
  - .43 Kejuaraan
  - .44 Piagam
  
- 415 Koordinasi
  - .1 Sektor Khusus
  - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
  - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
  - .4 Kerjasama
  - .41 Luar Negeri (UNICEF)
  - .42 Perguruan Tinggi
  - .43 Kementerian / Lembaga Non Kementerian

- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 419 -
- 420 PENDIDIKAN**
  - .1 Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja
- 421 Sekolah
  - .1 Pra Sekolah
  - .2 Sekolah Dasar
  - .3 Sekolah Menengah
  - .4 Sekolah Tinggi
  - .5 Sekolah Kejuruan
  - .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
  - .7 Kegiatan Pelajar
  - .71 Reuni Darmawisata
  - .72 Pelajar Teladan
  - .73 Resimen Mahasiswa
  - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
  - .9 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
  - .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan
  - .2 Tahun Pelajaran
  - .3 Hari Libur
  
  - .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
  - .5 Beasiswa
- 423 Metode Belajar
  - .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Simposium
  - .3 Diskusi
  - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
  - .5 Kurikulum
  - .6 Karya Tulis
  - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor  
Klasifikasi Disini: Guru Teladan
- 425 Sarana Pendidikan
  - .1 Gedung
    - .11 Gedung Sekolah
    - .12 Kampus
    - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
  - .2 Buku
  - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan
  - .1 Cabang Olah Raga
  - .2 Sarana

- .21 Gedung Olah Raga
- .22 Stadion
- .23 Lapangan
- .24 Kolam renang
- .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade, dsb
- .4 KONI
  
- 427 Kepramukaan Meliputi: Organisasi Dan Kegiatan Remaja  
Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja
  
- 428 Kepramukaan
  
- 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890
  
- 430 KEBUDAYAAN**
  
- 431 Kesenian
  - .1 Cabang Kesenian
  - .2 Sarana
    - .21 Gedung Kesenian
  
- 432 Kepurbakalaan
  - .1 Museum
  - .2 Peninggalan Kuno
    - .21 Candi Termasuk Pemugaran
    - .22 Benda
  
- 433 Sejarah
  
- 434 Bahasa
  
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
  
- 436 Kepercayaan
  
- 437 -
  
- 438 -
  
- 439 -
  
- 440 KESEHATAN**
  
- 441 Pembinaan Kesehatan
  - .1 Gizi
  - .2 Mata
  - .3 Jiwa
  - .4 Kanker
  - .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)
  - .6 Perawatan
  - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
  - .8 Pekan Imunisasi Nasional
  
- 442 Obat-obatan
  - .1 Pengadaan
  - .2 Penyimpanan

- 443 Penyakit Menular
  - .1 Pencegahan
  - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
    - .21 Kusta
    - .22 Kelamin
    - .23 Frambosia
    - .24 TBC / AIDS / HIV
  - .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
    - .31 Kholera
    - .32 Imunisasi
    - .33 Survailense
    - .34 Rabies (Anjing Gila) Antraks
  - .4 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
    - .41 Malaria
    - .42 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
    - .43 Filaria
    - .44 Serangga
  - .5 Hygiene Sanitasi
    - .51 Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
    - .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga)
    - .53 Pestisida
  
- 444 Gizi
  - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
  - .2 Keracunan Makanan
  - .3 Menu Makanan Rakyat
  - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
  - .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
  
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik
  
- 446 Tenaga Medis
  
- 447 Alat Medis
  
- 448 Pengobatan Tadisional
  - .1 Pijat
  - .2 Tusuk Jarum
  - .3 Jamu Tradisional
  - .4 Dukun / Paranormal
  
- 449 -
  
- 450 AGAMA**
  
- 451 Islam
  - .1 Peribadatan
    - .11 Sholat
    - .12 Zakat Fitrah
    - .13 Puasa
    - .14 MTQ
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama

- .4 Pendidikan
- .41 Tinggi
- .42 Menengah
- .43 Dasar
- .44 Pondok Pesantren
- .45 Gedung Sekolah
- .46 Tenaga Pengajar
- .47 Buku
- .48 Dakwah
- .49 Organisasi / Lembaga Pendidikan
- .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
- .6 Peradilan
- .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
- .8 Mazhab
  
- 452 Protestan
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .2 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Gerejani
  
- 453 Katolik
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Gerejani
  
- 454 Hindu
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Keagamaan
  
- 455 Budha
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Keagamaan
  
- 456 Urusan Haji
  - .1 ONH
  - .2 Manasik
  
- 457 -
  
- 458 -
  
- 458 -

**460 SOSIAL**

- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
  - .1 Cacat Mata
  - .2 Cacat Tubuh
  - .3 Cacat Mental
  - .4 Bisul/Tuli
  
- 462 Tuna Sosial
  - .1 Gelandangan
  - .2 Pengemis
  - .3 Tuna Susila
  - .4 Anak Nakal
  
- 463 Kesejahteraan Anak / Keluarga
  - .1 Anak Putus Sekolah
  - .2 Ibu Teladan
  - .3 Anak Asuh
  
- 464 Pembinaan Pahlawan
  - .1 Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan Dan Jandanya
  - .2 Perintis Kemerdekaan Meliputi: Pembinaan, Penghargaan Dan Tunjangan Kepada Perintis
  - .3 Cacat Veteran
  
- 465 Kesejahteraan Sosial
  - .1 Lanjut Usia
  - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
  
- 466 Sumbangan Sosial
  - .1 Korban Bencana
  - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan
  - .3 Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb
  - .4 Panti Asuhan
  - .5 Panti Jompo
  
- 467 Bimbingan Sosial
  - .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman
  
- 468 PMI
  
- 469 Makam
  - .1 Umum
  - .2 Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kpd Pahlawan Dan Jandanya
  - .3 Khusus Keluarga Raja
  - .4 Krematorium

**470 KEPENDUDUKAN**

- 471 Pendaftaran Penduduk
  - .1 Identitas Penduduk
    - .11 Biodata



- .12 Nomor Induk Kependudukan
  - .13 Kartu Tanda Penduduk
  - .14 Kartu Keluarga
  - .15 Advokasi Identitas Penduduk
  - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
  - .21 Perpindahan Penduduk WNI
  - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
  - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
  - .24 Daerah Terbelakan
  - .25 Bedol Desa
  - .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
  - .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
  - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
  - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
  - .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
  - .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
  - .41 Akibat Bencana Alam
  - .42 Akibat Kerusakan Sosial
  - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
  - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
- .1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi
  - .11 Kelahiran
  - .12 Kematian
  - .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian
  - .2 Perkawinan, Perceraian Dan Advokasi
  - .21 Perkawinan Agama Islam
  - .22 Perkawinan Agama Non Islam
  - .23 Perceraian Agama Islam
  - .24 Perceraian Agama Non Islam
  - .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
  - .3 Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi
  - .31 Pengangkatan Anak
  - .32 Pengakuan Anak
  - .33 Pengesahan Anak
  - .34 Perubahan Anak
  - .35 Pembatalan Anak
  - .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta
  - .4 Pencatatan Kewarganegaraan
  - .41 Akibat Perkawinan
  - .42 Akibat Kelahiran
  - .43 Non Perkawinan
  - .44 Non Kelahiran
  - .45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
- .1 Teknologi Informasi
  - .11 Perangkat Keras
  - .12 Perangkat Lunak
  - .13 Jaringan Komunikasi Data
  - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi

- .21 Daerah Maju
- .22 Daerah Berkembang
- .23 Daerah Terbelakang
- .3 Pengolahan Data Kependudukan
- .31 Pendaftaran Penduduk
- .32 Kejadian Vital Penduduk
- .33 Penduduk Non Registrasi
- .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
- .41 Media Elektronik
- .42 Media Cetak
- .43 Outlet
  
- 474 Perkembangan Penduduk
  - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
    - .11 Struktur Jumlah
    - .12 Komposisi
    - .13 Fertilitas
    - .14 Kesehatan Reproduksi
    - .15 Morbiditas Penduduk
    - .16 Mortalitas Penduduk
  - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
    - .21 Anak dan Remaja
    - .22 Penduduk Usia Produktif
    - .23 Penduduk Lanjut Usia
    - .24 Gender
  - .3 Penataan Persebaran Penduduk
    - .31 Migrasi Antar Wilayah
    - .32 Migrasi Internasional
    - .33 Urbanisasi
    - .34 Sementara
    - .35 Migrasi Non Permanen
  - .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
    - .41 Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk
    - .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
    - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
    - .44 Partisipasi Masyarakat
  - .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
    - .51 Pendidikan Jalur Sekolah
    - .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
    - .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
    - .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
  
- 475 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
  - .1 Indikator Kependudukan
    - .11 Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan
    - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
    - .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
  - .2 Proyeksi Kependudukan
    - .21 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
    - .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
  - .3 Analisis Dampak Kependudukan
    - .31 Penyusunan Dan Pengembangan
    - .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan

- .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
  - .41 Lembaga Internasional
  - .42 Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba
  - .43 Lembaga Usaha Swasta
  - .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
  - .51 Lembaga Pemerintah
  - .52 Pemerintah Provinsi dan Kota
  - .53 Pemerintah Kabupaten
  - .6 Analisis
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 -
- 480 MEDIA MASSA**
- 481 Penerbitan
- .1 Surat Kabar
  - .2 Majalah
  - .3 Buku
  - .4 Penerjemahan
- 482 Radio
- .1 RRI
  - .11 Siaran Pedesaan Jgn Diklasifikasikan Disini
  - .2 Non RRI
  - .3 Luar Negeri
- 483 Televisi
- 484 Film
- 485 Pers
- .1 Kewartawanan
  - .2 Wawancara
  - .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
- .1 Pameran Non Komersil
- 488 Operation Room
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 PENGADUAN MASYARAKAT**
- 491 -

- 492 -
- 493 -
- 494 -
- 495 -
- 496 -
- 497 -
- 498 -
- 499 -

**500 PEREKONOMIAN**

- .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang, Klasifikasikan Masalahnya
- 504 -
- 505 -
- 506 -
- 507 -
- 508 -
- 509 -

**510 PERDAGANGAN**

- Klasifikasikan Disini: Tata Niaga
- .1 Promosi Perdagangan
- .11 Pekan Raya
- .12 Iklan
- .13 Pameran Non Komersil
- .2 Pelelangan
- .3 Tera
- 511 Pemasaran
- .1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah : Beras, Garam, Tanah, Minyak Goreng
- .2 Pasar
- .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor

- 513 Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi untuk BUUD, KUD lihat ( 412.31-412.32)
- 519 -

**520 PERTANIAN**

- 521 Tanaman Pangan
  - .1 Program
    - .11 Bimas / Inmas Termasuk Kredit
    - .12 Penyuluhan
  - .2 Produksi
    - .21 Padi / Panen
    - .22 Palawija
    - .23 Jagung
    - .24 Ketela Pohon / Ubi-Ubian
    - .25 Hortikultura
    - .26 Sayuran / Buah-Buahan
    - .27 Tanaman Hias
    - .28 Pembudidayaan Rumput Laut
  - .3 Saran Usaha Pertanian
    - .31 Peralatan Meliputi: Traktor Dan Peralatan Lainnya
    - .33 Pembibitan
    - .34 Pupuk
  - .4 Perlindungan Tanaman
    - .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang
    - .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus Dan Sejenisnya
    - .43 Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pemberantasan Melalui Udara
    - .44 Pestisida
  - .5 Tanah Pertanian Pangan
    - .51 Persawahan
    - .52 Perladangan
    - .53 Kebun
    - .54 Rumpun Ikan Laut
    - .55 KTA/Lahan Kritis
  - .6 Pengusaha Petani
    - .7 Bina Usaha
    - .71 Pasca Panen
    - .72 Pemasaran Hasil
- 522 Kehutanan
  - .1 Program
    - .11 Hak Pengusahaan Hutan
    - .12 Tata Guna Hutan

- .13 Perpetaan Hutan
  - .14 Tumpangsari
  - .2 Produksi
  - .21 Kayu
  - .22 Non Kayu
  - .3 Sarana Usaha Kehutanan
  - .4 Penghijauan, Reboisasi
  - .5 Kelestarian
  - .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
  - .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu
  - .53 Kebun Binatang
  - .54 Konservasi Lahan
  - .6 Penyakit/Hama
  - .7 Jenis-jenis Hutan
  - .71 Hutan Hidup
  - .72 Hutan Wisata
  - .73 Hutan Produksi
  - .74 Hutan Lindung
- 523 Perikanan
- .1 Program
  - .11 Penyuluhan
  - .12 Teknologi
  - .2 Produksi
  - .21 Pelelangan
  - .3 Usaha Perikanan
  - .31 Pembibitan
  - .32 Daerah Penangkapan
  - .33 Pertambakan Meliputi: ( Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang dll )
  - .34 Jaring Terapung
  - .4 Sarana
  - .41 Peralatan
  - .42 Kapal
  - .43 Pelabuhan
  - .5 Pengusaha
  - .6 Nelayan
- 524 Peternakan
- .1 Produksi
  - .11 Susu Ternak Rakyat
  - .12 Telur
  - .13 Daging
  - .14 Kulit
  - .2 Sarana Usaha Ternak
  - .21 Pembibitan
  - .22 Kandang Ternak
  - .3 Kesehatan Hewan
  - .31 Penyakit Hewan
  - .32 Pos Kesehatan Hewan
  - .33 Tesi Pullorum
  - .34 Karantina
  - .35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya

- .4 Perunggasan
- .5 Pengembangan Ternak
- .51 Inseminasi Buatan
- .52 Pembibitan / Bibit Unggul
- .53 Penyebaran Ternak
- .6 Makanan Ternak
- .7 Tempat Pemotongan Hewan
- .8 Data Peternakan
  
- 525 Perkebunan
  - .1 Program
  - .2 Produksi
  - .21 Karet
  - .22 Teh
  - .23 Tembakau
  - .24 Tebu
  - .25 Cengkeh
  - .26 Kopra
  - .27 Kopi
  - .28 Coklat
  - .29 Aneka Tanaman
  
- 526 -
  
- 527 -
  
- 528 -
  
- 529 -
  
- 530 PERINDUSTRIAN**
  - .08 Undang-Undang Gangguan
  
- 531 Industri Logam
  
- 532 Industri Mesin/Elektronik
  
- 533 Industri Kimia/Farmasi
  
- 534 Industri Tekstil
  
- 535 Industri Makanan / Minuman
  
- 536 Aneka Industri / Perusahaan
  
- 537 Aneka Kerajinan
  
- 538 Usaha Negara / BUMN
  - .1 Perjan
  - .2 Perum
  - .3 Persero / PT, CV
  
- 539 Perusahaan Daerah / BUMD/BULD
  
- 540 PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN**
  
- 541 Minyak Bumi / Bensin
  - .1 Pengusahaan

- 542 Gas bumi
  - .1 Eksploitasi / Pengeboran
  - .11 Kontrak Kerja
  - .2 Pengolahan, Meliputi :Tangki, Pompa, Tanker
  
- 543 Aneka Tambang
  - .1 Timah
  - .2 Alumunium, Boxit
  - .3 Besi Termasuk Besi Tua
  - .4 Tembaga
  - .5 Batu Bara
  
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
  
- 545 Logam
  
- 546 Geologi
  - .1 Vulkanologi
  - .11 Pengawasan Gunung Berapi
  - .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
  
- 547 Hidrologi
  
- 548 Kesamudraan
  
- 549 Pesisir Pantai
  
- 550 PERHUBUNGAN**
  
- 551 Perhubungan Darat
  - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
  - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
  - .2 Angkutan Jalan Raya
  - .21 Perizinan
  - .22 Terminal
  - .23 Alat Angkutan
  - .3 Angkutan Sungai
  - .31 Perizinan
  - .32 Terminal
  - .33 Pelabuhan
  - .4 Angkutan Danau
  - .41 Perizinan
  - .42 Terminal
  - .43 Pelabuhan
  - .5 Feri
  - .51 Perizinan
  - .52 Terminal
  - .53 Pelabuhan
  - .6 Perkereta-Apian
  
- 552 Perhubungan Laut
  - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
  - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
  - .12 Pelayaran Dalam Negeri



- .13 Pelayaran Luar Negeri
- .2 Perkapalan Alat Angkutan
- .3 Pelabuhan
- .4 Pengerukan
- .5 Penjagaan Pantai
  
- 553 Perhubungan Udara
  - .1 Lalu Lintas Udara / Keamanan Lalu Lintas Udara
  - .2 Pelabuhan Udara
  - .3 Alat Angkutan
  
- 554 Pos
  
- 555 Telekomunikasi
  - .1 Telepon
  - .2 Telegram
  - .3 Telex / SSB, Faximile
  - .4 Satelit, Internet
  - .5 Stasiun Bumi, Parabola
  
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
  - .1 Obyek Kepariwisataaan Taman Mini Indonesia Indah
  - .2 Perhotelan
  - .3 Travel service
  - .4 Tempat Rekreasi
  
- 557 Meteorologi
  - .1 Ramalan Cuaca
  - .2 Curah Hujan
  - .3 Kemarau Panjang
  
- 558 -
  
- 559 -
  
- 560 TENAGA KERJA**
  - .1 Pengangguran
  
- 561 Upah
  
- 562 Penempatan Tenaga Kerja, TKI
  
- 563 Latihan Kerja
  
- 564 Tenaga Kerja
  - .1 Butsi
  - .2 Padat Karya
  
- 565 Perselisihan Perburuhan
  
- 566 Keselamatan Kerja
  
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
  
- 568 Kesejahteraan Buruh

569 Tenaga Orang Asing

**570 PERMODALAN**

571 Modal Domestik

572 Modal Asing

573 Modal Patungan (Joint Venture) / Penyertaan Modal

574 Pasar Uang Dan Modal

575 Saham

576 Belanja Modal

577 Modal Daerah

578 -

579 -

**580 PERBANKAN / MONETER**

581 Kredit

582 Investasi

583 Pembukaan ,Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito

584 Bank Pembangunan Daerah

585 Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas

586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer

587 Fiskal

588 Hutang Negara

589 Moneter

**590 AGRARIA**

591 Tataguna Tanah

.1 Pemetaan dan Pengukuran

.2 Perpetaan

.3 Penyediaan Data

.4 Fatwa Tata Guna Tanah

.5 Tanah Kritis

592 Landreform

.1 Redistribusi

.11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan

.12 Penentuan Tanah Obyek Landreform

.13 Pembagian Tanah Obyek Landreform

- .14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
  - .2 Ganti Rugi
  - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan  
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Tanah
  - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee  
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
  - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir  
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
  - .3 Bagi Hasil
  - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
  - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
  - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
  - .4 Gadai Tanah
  - .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
  - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
  - .43 Sengketa Gadai Tanah
  - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
  - .6 Pengembangan
  - .7 Yayasan Dana Landreform
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
- .01 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis
  - .1 Sewa Tanah
  - .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu, Tembakau, Rosela, Chorcorus
  - .2 Hak Milik
  - .21 Perorangan
  - .22 Badan Hukum
  - .3 Hak Pakai
  - .31 Perorangan
  - .311 Warga Negara Indonesia
  - .312 Warga Negara Asing
  - .32 Badan Hukum
  - .321 Badan Hukum Indonesia
  - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing
  - .33 Tanah Gedung-Gedung Negara
  - .4 Guna Usaha
  - .41 Perkebunan Besar
  - .42 Perkebunan Rakyat
  - .43 Peternakan
  - .44 Perikanan
  - .45 Kehutanan
  - .5 Hak Guna Bangunan
  - .51 Perorangan
  - .52 Badan Hukum
  - .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
  - .54 Badan Hukum Asing Belanda-Prrk No 5165
  - .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
  - .6 Hak Pengelolaan
  - .61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
  - .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
  - .7 Sengketa Tanah
  - .71 Peradilan Perkara Tanah
  - .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
  - .81 Pencabutan Hak

- .82 Pembebasan Tanah
- .83 Ganti Rugi Tanah
  
- 594 Pendaftaran Tanah
  - .1 Pengukuran / Pemetaan
  - .11 Fotogrametri
  - .12 Terristris
  - .13 Triangulasi
  - .14 Peralatan
  - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965)
  - .3 Sertifikat
  - .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
  
- 595 Lahan Transmigrasi
  - .1 Tataguna Tanah
  - .2 Landreform
  - .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
  - .4 Pendaftaran Tanah
  
- 596 -
  
- 597 -
  
- 598 -
  
- 599 -
  
  
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN**
  
- 601 Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi
  
- 602 Kontraktor Pemborong
  - .1 Tender
  - .2 Penunjukan
  - .3 Prakualifikasi
  - .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
  - .32 Tanda Daftar Rekanan
  
- 603 Arsitektur
  
- 604 Bahan Bangunan
  - .1 Tanah Dan Batu Seperti: Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb
  - .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas)
  - .3 Besi Dan Logam Lainnya
    - .31 Besi Beton
    - .32 Besi Profil
    - .33 Paku
    - .34 Alumunium, Profil
  - .4 Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech Til, Pengawet Kayu)
  - .5 Semen
  - .6 Kayu
  - .7 Bahan Penutup Atap ( Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan Sebagainya)

- .8 Alat-Alat Penggantung Dan Pengunci
- .9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya
  
- 605 Instalasi
  - .1 Instalasi Bangunan
  - .2 Instalasi Listrik
  - .3 Instalasi Air Sanitasi
  - .4 Instalasi Pengatur Udara
  - .5 Instalasi Akustik
  - .6 Instalasi Cahaya / Penerangan
  
- 606 Konstruksi Pencegahan
  - .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
  - .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa
  - .3 Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin Udara/Panas
  - .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
  - .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Explosive
  - .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga
  - .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom
  
- 607 -
  
- 608 -
  
- 609 -
  
- 610 PENGAIRAN**
  
- 611 Irigasi
  - .1 Bangunan Waduk
  - .11 Bendungan
  - .12 Tanggul
  - .13 Pelimpahan Banjir
  - .14 Menara Pengambilan
  - .2 Bangunan Pengambilan
  - .21 Bendungan
  - .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
  - .23 Bendungan Dengan Pompa
  - .24 Pengambilan Bebas
  - .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
  - .26 Sumur Dengan Pompa
  - .27 Kantung Lumpur
  - .28 Slit Ekstrator
  - .29 Escape Channel
  - .3 Bangunan Pembawa
  - .31 Saluran
  - .311 Saluran Induk
  - .312 Saluran Sekunder
  - .313 Suplesi
  - .314 Tersier
  - .315 Saluran Kwarter
  - .316 Saluran Pasangan
  - .317 Saluran Tertutup / Terowongan
  - .32 Bangunan

- .321 Bangunan Bagi
- .322 Bangunan Bagi Dan Sadap
- .323 Bangunan Sadap
- .324 Bangunan Check
- .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang
- .36 Syphon
- .37 Gorong-Gorong
- .38 Pelimpah Samping
- .4 Bangunan Pembuang
- .41 Saluran
- .411 Saluran Pembuang Induk
- .412 Saluran Pembuang Sekunder
- .413 Saluran Tersier
- .42 Bangunan
- .421 Bangunan Outlet
- .422 Bangunan Terjun
- .423 Bangunan Penahan Banjir
- .43 Gorong-Gorong Pembuang
- .44 Talang Pembuang
- .45 Syphon Pembuang
- .5 Bangunan Lainnya
- .51 Jalan
- .511 Jalan Inspeksi
- .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
- .52 Jembatan
- .521 Jembatan Inspeksi
- .522 Jembatan Hewan
- .53 Tangga Cuci
- .54 Kubangan Kerbau
- .55 Waduk Lapangan
- .56 Bangunan Penunjang
- .57 Jaringan Telepon
- .58 Stasiun Agro
  
- 612 Folder
  - .1 Tanggul Keliling
  - .11 Tanggul
  - .12 Bangunan Penutup Sungai
  - .13 Jembatan
  - .2 Bangunan Pembawa
  - .21 Saluran
  - .211 Saluran Muka
  - .212 Saluran Pembawa Waduk
  - .213 Saluran Pembawa Sekunder
  - .22 Stasiun Pompa Pemasukan
  - .23 Bangunan Bagi
  - .24 Gorong-Gorong
  - .25 Syphon
  - .3 Bangunan Pembuang
  - .31 Stasiun Pompa Pembuang
  - .32 Saluran
  - .321 Saluran Pembuang Induk
  - .322 Saluran Pembuang Sekunder

- .33 Pintu Air Pembuangan
- .34 Gorong-Gorong Pembuangan
- .35 Syphon Pembuangan
- .4 Bangunan Lainnya
- .41 Bangunan
- .411 Bangunan Pengukur Air
- .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
- .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Aksplorasi
  
- 613 Pasang Surut
  - .1 Bangunan Pembawa
  - .11 Saluran
    - .111 Saluran Pembawa Induk
    - .112 Saluran Pembawa Sekunder
    - .113 Saluran Pembawa Tersier
    - .114 Saluran Penyimpanan Air
  - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
  - .2 Bangunan Pembuang
    - .21 Saluran
      - .211 Saluran Pembuang Induk
      - .212 Saluran Pembuang Sekunder
      - .213 Saluran Pembuang Tersier
      - .214 Saluran Pengumpul Air
    - .22 Bangunan Pintu Pembuang
  - .3 Bangunan Lainnya
    - .31 Kolam Pasang
    - .32 Saluran
      - .321 Saluran Lalu Lintas
      - .322 Saluran Muka
    - .33 Bangunan
      - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
      - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
      - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
    - .34 Jalan
    - .35 Jembatan
  
  - 614 Pengendalian Sungai
    - .1 Bangunan Pengaman
      - .11 Tanggul Banjir
      - .12 Pintu Pengatur Banjir
      - .13 Klep Pengatur Banjir
      - .14 Tembok Pengaman Talud
      - .15 Krib
      - .16 Kantung Lumpur
      - .17 Check-Dam
      - .18 Syphon
    - .2 Saluran Pengaman
      - .21 Saluran Banjir
      - .22 Saluran Drainage
      - .23 Corepure
    - .3 Bangunan Lainnya
      - .31 Warning System
      - .32 Stasiun
        - .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan

- .322 Stasiun Pengukur Air
- .323 Stasiun Pengukur Cuaca
- .324 Stasiun Pos Penjagaan
  
- 615 Pengamanan Pantai
  - .1 Tanggul
  - .2 Krib
  - .3 Bangunan Lainnya
  
- 616 Air Tanah
  - .1 Stasiun Pompa
  - .2 Bangunan Pembawa
  - .3 Bangunan Pembuang
  - .4 Bangunan Lainnya
  
- 617 -
  
- 618 -
  
- 619 -
  
- 620 JALAN**
  
- 621 Jalan Kota
  - .1 Daerah Penguasaan
  - .11 Tanah
  - .12 Tanaman
  - .13 Bangunan
  - .2 Bangunan Sementara
  - .21 Jalan Sementara
  - .22 Jembatan Sementara
  - .23 Kantor Proyek
  - .24 Gedung Proyek
  - .25 Barak Kerja
  - .26 Laboratorium Lapangan
  - .27 Rumah
  - .3 Badan Jalan
  - .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
  - .32 Stabilisasi
  - .4 Perkerasan
  - .41 Lapis Pondasi Bawah
  - .42 Lapis Pondasi
  - .43 Lapis Permukaan
  - .5 Drainage
  - .51 Parit Tanah
  - .52 Gorong-Gorong (Culvert)
  - .6 Buku Trotuir
  - .61 Tanah
  - .62 Perkerasan
  - .63 Pasangan
  - .7 Median
  - .71 Tanah
  - .72 Tanaman
  - .73 Perkerasan
  - .74 Pasangan



.8	Daerah Samping
.82	Tanaman
.83	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
.91	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
.96	Rel Pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapis Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit
.52	Gorong-Gorong (Culvert)
.53	Sub Drainage
.6	Trotoar
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
.91	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)

.96	Rel Pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
623	-
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-
<b>630</b>	<b>JEMBATAN</b>
631	Jembatan Pada Jalan Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jalan
.42	Pondasi Pilar
.43	Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang / Trotoar
.65	Sandaran
.66	Talang air
.7	Bangunan / Pengaman
.71	Turap Penahan
.72	Bronjong

.73	Strek Dam
.74	Kist Dam
.75	Corepure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok ROW (Sempadan)
.86	Pagar
.9	Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Baku
.95	Median
632	Jembatan Pada Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan Atas
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang / Trotoar
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengaman
.71	Turap / Penahan
.72	Bronjong
.73	Stek Dam
.74	Kist Dam

- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median

633 -

634 -

635 -

636 -

637 -

638 -

639 -

**640 BANGUNAN**

641 Bangunan Pemerintah

- .1 Gedung Pengadilan
- .2 Rumah Pejabat Negara
- .3 Gedung DPR
- .4 Gedung Balai Kota
- .5 Penjara
- .6 Perkantoran

642 Bangunan Pendidikan

- .1 Taman Kanak-Kanak
- .2 SD & SEKOLAH MENENGAH
- .3 Perguruan Tinggi

643 Bangunan Rekreasi

- .1 BANGUNAN OLAH RAGA
- .2 Gedung Kesenian
- .3 Gedung Pemancar

644 Bangunan Perdagangan

- .1 Pusat Perbelanjaan
- .2 Gedung Perdagangan
- .3 Bank
- .4 Pekantoran

- 645 Bangunan Pelayanan Umum
  - .1 MCK
  - .2 Gedung Parkir
  - .3 Rumah Sakit
  - .4 Gedung Telkom
  - .5 Terminal Angkutan Udara
  - .6 Terminal Angkutan Udara
  - .7 Terminal Angkutan Darat
  - .8 Bangunan Keagamaan
  
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
  - .1 Monumen
  - .2 Candi
  - .3 Keraton
  - .4 Rumah Tradisional
  
- 647 Bangunan Industri
  
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
  - .1 Rumah Perkotaan
    - .11 Inti / Sederhana
    - .12 Sedang / Mewah
  - .2 Rumah Pedesaan
  - .21 Rumah Contoh
  - .3 Real Estate
  - .4 Bapetarum
  
- 649 Elemen Bangunan
  - .1 Pondasi
    - .11 Di Atas Tiang
  - .2 Dinding
    - .21 Penahan Beban
    - .22 Tidak Menahan Beban
  - .3 Atap
  - .4 Lantai / Langit-Langit
    - .41 Supended
    - .42 Solit
  - .5 Pintu / Jendela
    - .51 Pintu Harmonik
    - .52 Pintu Biasa
    - .53 Pintu Sorong
    - .54 Pintu Kayu
    - .55 Jendela Sorong
    - .56 Jendela Vertikal
  
- 650 TATA KOTA**
  
- 651 Daerah Perdagangan / Pelabuhan
  - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
  - .2 Daerah Perkotaan
  
- 652 Daerah Pemerintah
  
- 653 Daerah Perumahan
  - .1 Kepadatan Rendah
  - .2 Kepadatan Tinggi

- 654 Daerah Industri
  - .1 Industri Berat
  - .2 Industri Ringan
  - .3 Industri Ringan (Home Industry)
  
- 655 Daerah Rekreasi
  - .1 Public Garden
  - .2 Sport & Playing Fields
  - .3 Open Space
  
- 656 Transportasi (Tata Letak)
  - .1 Jaringan Jalan
    - .11 Penerangan Jalan
  - .2 Jaringan Kereta Api
  - .3 Jaringan Sungai
  
- 657 Assaineering
  - .1 Saluran Pengumpulan
  - .2 Instalasi Pengolahan
    - .21 Bangunan
      - .211 Bangunan Penyaringan
      - .212 Bangunan Penghancur Kotoran / Sampah
      - .213 Bangunan Pengendap
      - .214 Bangunan Pengering Lumpur
    - .22 Unit Densifektan
    - .23 Unit Perpompaan
  
- 658 Kesehatan Lingkungan
  - .1 Persampahan
    - .11 Bangunan Pengumpul
    - .12 Bangunan Pemusnahan
  - .2 Pengotoran Udara
  - .3 Pengotoran Air
    - .31 Air Buangan Industri Limbah
  - .4 Kegaduhan
  - .5 Kebersihan Kota
  
- 659 -
  
- 660 TATA LINGKUNGAN**
  - .1 Persampahan
  - .2 Kebersihan Lingkungan
  - .3 Pencemaran
    - .31 Pecemaran Air
    - .32 Pencemaran Udara
  
- 661 Daerah Hutan
  
- 662 Daerah Pertanian
  
- 663 Daerah Pemukiman
  
- 664 Pusat Pertumbuhan
  
- 665 Transportasi
  - .1 Jaringan Jalan

- .2 Jaringan Kereta Api
- .3 Jaringan Sungai
  
- 666 -
- 667 -
- 668 -
- 669 -
  
- 670 KETENAGAAN**
  
- 671 Listrik
  - .1 Kelistrikan
  - .11 Kelistrikan PLN
  - .12 Kelistrikan Non PLN
  - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
  - .21 PLTA ( Pembangkit Listrik Tenaga Air )
  - .22 PLTD ( Pembangkit Listrik Tenaga Diesel )
  - .23 PLTG P ( Pembangkit Listrik Tenaga Gas )
  - .24 PLTM ( Pembangkit Listrik Tenaga Matahari )
  - .25 PLTN ( Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir )
  - .26 PLTPB ( Pembangkit Listrik Tenaga Uap )
  - .3 Transmisi Tenaga Listrik
  - .31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
  - .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi
  - .33 Kabel Bawah Tanah
  - .4 Distribusi Tenaga Listrik
  - .41 Gardu Distribusi
  - .42 Tegangan Rendah
  - .43 Tegangan Menengah
  - .44 Jaringan Bawah Tanah
  - .5 Pengusahaan Listrik
  - .51 Sambungan Listrik
  - .52 Penjualan Tenaga Listrik
  - .53 Tarif Listrik
  
- 672 Tenaga Air
  
- 673 Tenaga Minyak
  
- 674 Tenaga Gas
  
- 675 Tenaga Matahari
  
- 676 Tenaga Nuklir
  
- 677 Tenaga Panas Bumi
  
- 678 Tenaga Uap
  
- 679 Tenaga Lainnya

**680 PERALATAN**

- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 684 -
- 685 -
- 686 -
- 687 -
- 688 -
- 689 -

**690 AIR MINUM**

- 691 Intake
  - .1 Broncaptering
  - .2 Sumur
  - .3 Bendungan
  - .4 Saringan (screen)
  - .5 Pintu air
  - .6 Saluran Pembawa
  - .7 Alat Ukur
  - .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
  - .1 Perpipaian
  - .2 Katup Udara (Air Relief)
  - .3 Katup Penguras (Blow Off)
  - .4 Bak Pelepas Tekanan
  - .5 Jembatan Pipa
  - .6 Syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
  - .1 Bangunan Ukur
  - .2 Bangunan Aerasi
  - .3 Bangunan Pengendapan
  - .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
  - .5 Bangunan Pengaduk
  - .6 Bangunan Saringan
  - .7 Perpompaan
  - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
  - .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
  - .11 Menara
  - .12 Reservoir di Bawah Tanah
  - .2 Perpipaian
  - .3 Perpompaan



- .4 Jembatan Pipa
- .5 Syphon
- .6 Hydran
- .61 Hydran Umum
- .62 Hydran Kebakaran
- .7 Katup
- .71 Katup Udara (Air Relief)
- .72 Katup Pelepas (Blow Off)
- .8 Bak Pelepas Tekanan

695 -

696 -

697 -

698 -

699 -

**700 PENGAWASAN**

701 Bidang Urusan Dalam

702 Bidang Peralatan

703 Bidang Kekayaan Daerah

704 Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan Sandi

705 Bidang Perencanaan

706 Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan

707 Bidang Penelitian

708 Bidang Konferensi

709 Bidang Perjalanan Dinas

**710 BIDANG PEMERINTAHAN**

711 Bidang Pemerintahan Pusat

712 Bidang Pemerintahan Provinsi

713 Bidang Pemerintahan Kabupaten / Kota

714 Bidang Pemerintahan Desa

715 Bidang MPR / DPR

716 Bidang DPRD Provinsi

717 Bidang DPRD Kabupaten / Kota

718 Bidang Hukum

719 Bidang Hubungan Luar Negeri

**720 BIDANG POLITIK**

721 Bidang Kepartaian

722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan

723 Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional

724 Bidang Organisasi Pemuda

725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, Dan Nelayan

726 Bidang Organisasi Wanita

727 Bidang Pemilihan Umum

728 -

729 -

**730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN**

731 Bidang Pertahanan

732 Bidang Kemiliteran

733 Bidang Perlindungan Masyarakat

734 Bidang Kemanan

735 Bidang Kejahatan

736 Bidang Bencana

737 Bidang Kecelakaan

738 -

739 -

**740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

741 Bidang Pembangunan Desa

742 Bidang Pendidikan

743 Bidang Kebudayaan

744 Bidang Kesehatan

745 Bidang Agama

746 Bidang Sosial

747 Bidang Kependudukan

748 Bidang Media Massa

749 -

**750 BIDANG PEREKONOMIAN**

751 Bidang Perdagangan

752 Bidang Pertanian

753 Bidang Perindustrian

754 Bidang Pertambangan / Kesamudraan

755 Bidang Perhubungan

756 Bidang Tenaga Kerja

757 Bidang Permodalan

758 Bidang Perbankan / Moneter

759 Bidang Agraria

**760 BIDANG PEKERJAAN UMUM**

761 Bidang Pengairan

762 Bidang Jalan

763 Bidang Jembatan

764 Bidang Bangunan

765 Bidang Tata Kota

766 Bidang Lingkungan

767 Bidang Ketenagaan

768 Bidang Peralatan

769 Bidang Air Minum

**770 -**

771 -

772 -

773 -

- 774 -
- 775 -
- 776 -
- 777 -
- 778 -
- 779 -

**780 BIDANG KEPEGAWAIAN**

- 781 Bidang Pengadaan Pegawai
- 782 Bidang Mutasi Pegawai
- 783 Bidang Kedudukan Pegawai
- 784 Bidang Kesejahteraan Pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang Penilaian
- 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
- 788 Bidang Pemberhentian Pegawai
- 789 Bidang Pendidikan Pegawai

**790 BIDANG KEUANGAN**

- 791 Bidang Anggaran
- 792 Bidang Otorisasi
- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang Pembina Kebendaharaan
- 797 Bidang Pendapatan
- 798 -
- 799 Bidang Bendaharaan

**800 KEPEGAWAIAN**

Klasifikasi Disini: Kebijakan Kepegawaian

- .1 Perencanaan
- .2 Penelitian

- .043 Pengaduan
- .05 Tim
- .07 Statistik
- .08 Peraturan Perundang-Undangan
  
- 801 -
- 802 -
- 803 -
- 804 -
- 805 -
- 806 -
- 807 -
- 808 -
- 809 -
  
- 810 PENGADAAN**  
Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai
  
- 811 Lamaran
  - .1 Testing
  - .2 Screening
  - .3 Panggilan
  
- 812 Pengujian Kesehatan
  
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
  - .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1
  - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
  - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
  - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
  - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres
  
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
  - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tenaga Kontrak
  - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
  - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
  
- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 818 -
- 819 -

**820 MUTASI**

Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer

821 Pengangkatan

- .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap
- .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1
- .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2
- .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3
- .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4
- .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara
- .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan
- .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag
- .22 Kepala Biro / Direktur / Inspektur / Kepala Pusat / Sekretaris / Kepala Dinas / Asisten Sekwilda
- .23 Kepala Bagian / Kepala Sub Direktorat / Kepala Bidang /Inspektur Pembantu  
Kepala Subbagian / Kepala Seksi /Kepala Sub Bidang /
- .24 Pemeriksa
- .25 Residen/Pembantu Gubernur
- .26 Wedana/Pembantu Bupati
- .27 Camat
- .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)
- .29 Jabatan Lainnya

822 Kenaikan Gaji Berkala

- .1 Pegawai Golongan 1
- .2 Pegawai Golongan 2
- .3 Pegawai Golongan 3
- .4 Pegawai Golongan 4

823 Kenaikan Pangkat / Pengangkatan

- .1 Pegawai Golongan 1
- .2 Pegawai Golongan 2
- .3 Pegawai Golongan 3
- .4 Pegawai Golongan 4

824 Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan

- .1 Pegawai Golongan 1
- .2 Pegawai Golongan 2
- .3 Pegawai Golongan 3
- .4 Pegawai Golongan 4
- .5 Lolos Butuh
- .6 Kurikulum dan Silabi
- .7 Proposal (TOR)

825 Datasering dan Penempatan Kembali

826 Penunjukan Tugas Belajar

- .1 Dalam Negeri
- .2 Luar Negeri
- .3 Tunjangan Belajar
- .4 Penempatan Kembali

827 Wajib Militer

828 Mutasi Dengan Instansi Lain

829 -

**830 KEDUDUKAN**

Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijazah, Dan Jenjang Pangkat

831 Perhitungan Masa Kerja

832 Penyesuaian Pangkat / Gaji

.1 Pegawai Golongan 1

.2 Pegawai Golongan 2

.3 Pegawai Golongan 3

.4 Pegawai Golongan 4

833 Penghargaan Ijazah / Penyesuaian

834 Jenjang Pangkat / Eselonering

835 -

836 -

837 -

838 -

839 -

**840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Permahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan Dispensasi.

841 Tunjangan

.1 Jabatan

.2 Kehormatan

.3 Kematian/Uang Duka

.4 Tunjangan Hari Raya

.5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah

.6 Keluarga

.7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)

842 Dana

.1 Taspen

.2 Kesehatan

.3 Asuransi

843 Perawatan Kesehatan

.1 Poliklinik

.2 Perawatan Dokter

.3 Obat-Obatan

.4 Keluarga Berencana

- 844 Koperasi / Distribusi
  - .1 Distribusi Pangan
  - .2 Distribusi Sandang
  - .3 Distribusi Papan
  
- 845 Perumahan/Tanah
  - .1 Perumahan Pegawai
  - .2 Tanah Kapling
  - .3 Losmen/Hotel
  
- 846 Bantuan Sosial
  - .1 Bantuan Kebakaran
  - .2 Bantuan Kebanjiran
  
- 847 -
  
- 848 -
  
- 849 -
  
- 850 CUTI**  
Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain
  
- 851 Cuti Tahunan
  
- 852 Cuti Besar
  
- 853 Cuti Sakit
  
- 854 Cuti Hamil
  
- 855 Cuti Naik Haji/Umroh
  
- 856 Cuti Di Luar Tanggungan Negara
  
- 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
  
- 858 -
  
- 859 -
  
- 860 PENILAIAN**  
Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kakayaan Pribadi Dan Rehabilitasi
  
- 861 Penghargaan
  - .1 Bintang/Satyalencana
  - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
  - .3 Kenaikan Gaji Istimewa
  - .4 Hadiah Berupa Uang
  - .5 Pegawai Teladan
  
- 862 Hukuman
  - .1 Teguran Peringatan



- .2 Penundaan Kenaikan Gaji
  - .3 Penurunan Pangkat
  - .4 Pemindahan
- Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
  - 864 Ujian Dinas
    - .1 Tingkat 1
    - .2 Tingkat 2
    - .3 Tingkat 3
  - 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri  
Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi ( LP2P )
  - 866 Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali
  - 867 -
  - 868 -
  - 869 -
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN**  
Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah,/Janji Dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
  - 872 Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
  - 873 Registrasi
    - .1 NIP
    - .2 KARPEG
    - .3 Legitiminasi/Tanda Pengenal
    - .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
  - 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
    - .1 Tanggal Lahir
    - .2 Penggantian Nama
    - .3 Izin Kepartaian Organisasi
  - 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
    - .1 Pelimpahan Wewenang
    - .2 Specimen Tanda Tangan
  - 876 Penggajian
    - .1 SKPP
  - 877 Sumpah/Janji
  - 878 Korps Pegawai
  - 879 -

**880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI**

Meliputi : Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

881 Permintaan Sendiri

882 Dengan Hak Pensiun

- .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 1
- .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 2
- .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 3
- .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 4
- .5 Pensiun Janda / Duda
- .6 Pensiun Yatim Piatu
- .7 Uang Muka Pensiun

883 Karena Meninggal

- .1 Karena Meninggal Dalam Tugas

884 Alasan Lain

885 Uang Pesangon

886 Uang Tunggu

887 Untuk Sementara Waktu

888 Tidak Dengan Hormat

889 -

**PENDIDIKAN PEGAWAI**

Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan

**890**

891 Perencanaan

- .1 Program
- .2 Kurikulum dan Silabi
- .3 Proposal ( TOR )

892 Pendidikan \_Egular / Kader

- .1 IPDN / APDN
- .2 Kursus-Kursus Reguler

893 Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler

- .1 LEMHANAS
- .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM
- .3 Kursus-Kursus / Penataran
- .4 Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
- .5 Diklat Lainnya

- 894 Pendidikan Luar Negeri
  - .1 Berkesinambungan / Berkala / Bergelar
  - .2 Non Gelar / Diploma
  
- 895 Metode
  - .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Simposium
  - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
  - .4 Studi Lapangan, Kkn, Widyawisata
  - .5 Kurikulum/Tanya Jawab / Sylabi / Modul / Kursil
  - .6 Karya Tulis
  - .7 Penugasan
  - .8 Gladi
  
- 896 Tenaga Pengajar / Widyaiswara/Narasumber
  - .1 Moderator
  
- 897 Administrasi Pendidikan
  - .1 Tahun Pelajaran
  - .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
  - .3 STTP
  - .4 Penilaian Angka Kredit
  - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
  
- 898 Fasilitas Belajar
  - .1 Tunjangan Belajar
  - .2 Asrama
  - .3 Uang Makan
  - .4 Uang Transport
  - .5 Uang Buku
  - .6 Uang Ujian
  - .7 Uang Semester / Uang Kuliah
  - .8 Uang Saku
  
- 899 Sarana
  - .1 Bantuan Sarana Belajar
  - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
  - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya
  
- 900 KEUANGAN**
  
- 901 Nota Keuangan
  
- 902 APBN
  
- 903 APBD
  
- 904 APBN-P
  
- 905 Dana Alokasi Umum
  
- 906 Dana Alokasi Khusus
  
- 907 Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)

907 -

908 -

909 -

**910 ANGGARAN**

911 Rutin

912 Pembangunan

913 Anggaran Belanja Tambahan

914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)

.1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)

915 Daftar Isian Poyek (DIP)

.1 Daftar Usulan Proyek (DUP)

.2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)

916 Revisi Anggaran

917 -

918 -

919 -

**920 OTORISASI / SKO**

921 Rutin

922 Pembangunan

923 SIAP

924 Ralat SKO

925 -

926 -

927 -

928 -

929 -

**930 VERIFIKASI**

931 SPM Rutin (daftar p8)

932 SPM Pembangunan (daftar p8)

933 Penerimaan (daftar p6. p7)

934 SPJ Rutin

935 SPJ Pembangunan

936 Nota Pemeriksaan

937 SP Pemindahan Pembukuan

938 -

939 -

**940 PEMBUKUAN**

941 Penyusunan Perhitungan Anggaran

942 Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan

943 Laporan Fisik Pembangunan

944 -

945 -

946 -

947 -

948 -

949 -

**950 PERBENDAHARAAN**

951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)

952 Tuntutan Bendaharawan

953 Penghapusan Kekayaan Negara

954 Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek Dan  
Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan

955 Spesimen Tanda Tangan

956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan

957 -

958 -

959 -

**960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN**

961 Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas

962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan

963 Laporan Keuangan Bendaharawan

964 -

965 -

966 -

967 -

968 -

969 -

**970 PENDAPATAN**

971 Perimbangan Keuangan

972 Subsidi

973 Pajak, Ipeda, IHH,IHPH

974 Retribusi

975 Bea

976 Cukai

977 Pungutan / PNBP

978 Bantuan Presiden, Menteri Dan Bantuan Lainnya

979 -

**980 -**

981 -

982 -

983 -

984 -

985 -

986 -

987 -

988 -

989 -

**990 BENDAHARAWAN**

991 SKPP / SPP

992 Teguran SPJ

993 -

994 -

995 -

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO